



Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri

Erfan Hidayat¹, Teguh Pramono², Imam Fachruddin³, Fendy Artha Prissando⁴*

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Jl. Selomangleng 1 Kota Kediri 64115

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29/01/2023

Received in revised form 10/06/2023

Accepted 11/06/2023

Abstract

This research takes a case study at the Kediri Regency Trade Office in applying the principles of Good Governance in realizing the quality of public services. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The data collection technique used interviews with selected informants, namely apparatus at the Market UPTD, and the Kediri District Trade Office. Data analysis uses an interactive model of four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study state that the application of the principles of Good Governance at the Kediri Regency Trade Service is quite good but has several notes. The record is in terms of transparency and participation. Transparency must be further strengthened by commitment between stakeholders in its implementation. Meanwhile, participation can be said to be not very participatory, because it has not involved the community when formulating policies. Supporting factors consist of 3 (three) things, namely the role and support of the leadership, collaboration between governments, and direct supervision from law enforcement officials. While the inhibiting factors consist of 3 (three) things, namely the head of the service which is not yet definitive, limited human resources, and reports from NGOs.

Keywords : *Good Governance, Public Service, Market Service*

Abstrak

Penelitian ini mengambil study kasus pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan terpilih yaitu aparatur di UPTD Pasar, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Analisis data menggunakan model interaktif empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun memiliki beberapa catatan. Catatan tersebut dalam hal transparansi dan partisipasi. Transparansi harus lebih diperkuat komitmen antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sementara untuk partisipasi dapat dikatakan belum terlalu partisipatif, karena belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh ketika menyusun kebijakan. Faktor pendukung terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu peran dan dukungan pimpinan, kolaborasi antar

pemerintah, dan pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu kepala dinas yang belum definitive, keterbatasan SDM, dan adanya laporan dari LSM.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pelayanan Publik, Pelayanan Pasar

*Fendy Artha Prissando

E-mail : arthaprissa@unik-kediri.ac.id

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *Good Governance* sangat penting dijalankan oleh pemerintah, karena dengan prinsip ini dapat berperan sebagai pengendalian dan pengawasan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak pidana (Tarandung, 2023). Kemudian dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dilakukan penerapan prinsip *good governance*. Praktek penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* memiliki tujuan akhir terciptanya pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat akan layanan publik (Alfarizi, 2023).

Dalam rangka memberikan kualitas layanan pemerintah pusat menyusun peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang didalamnya memuat petunjuk teknis dalam memberikan kepastian hukum antara masyarakat dan penyelenggaran pelayanan publik (JDIH BPK RI, 2009). Sementara itu, tujuan utama diterapkannya regulasi ini adalah agar terciptanya batasan dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, peneliti akan memfokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang difokuskan pada pelayanan tera/tera ulang di UPTD metrologi legal dan pelayanan

pasar di UPTD Pasar. Seperti pada pelayanan retribusi pasar yang terkendala infrstruktur sehingga masih terdapat banyak pasar yang belum berkontribusi besar terhadap PDRB. Seperti yang kita ketahui bersama pasar adalah wadah kegiatan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas perdagangan. Sampai saat ini pasar tradisional dianggap masih menjadi pondasi dasar perekonomian di setiap wilayah. Sementara itu laju pertumbuhan pasar baru semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini seharusnya memberikan potensi besar terhadap kontribusi besar terhadap PDRB dari sektor perdagangan. Kenaikan jumlah pasar baru di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kediri, 2016-2021

Jenis Sarana Perdagangan	2018	2019	2020
Kelompok Pertokoan	151	200	198
Pasar	95	130	111
Swalayan	220	222	256
Toko	14.078	11.782	12.637
Warung	7.507	9.192	10.065
Jumlah/ Total	22.681	21.463	23.267

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah sarana dan prasarana perdagangan di tahun 2020. Di tahun 2019, total sarana prasaran perdagangan sebesar 21.463. Selanjutnya di Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 23.267 atau sebesar 1.804. Namun berdasarkan pengamatan pra riset kenaikan jumlah sarana prasaran tidak diimbangi

dengan kontribusi terhadap PDRB. Seperti yang tersaji pada Gambar berikut ini:

Gambar 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa sektor perdagangan yang notabene dipengaruhi oleh pasar justru mengalami perlambatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan terkesan tidak ada kontribusi nyata bagi PDRB Kabupaten Kediri. Hal tersebut terlihat dari data laju pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan di tahun 2020 turun di angka -8,83.

Sementara itu, terkait teknis pelayanan langsung yang diberikan oleh Dinas Perdagangan terhadap pasar terdapat sebagian layanan yang dilimpahkan legalitasnya kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Seperti pada UPTD Metrologi Legal yang membantu Dinas Perdagangan dalam hal mengawasi perizinan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta satuan ukuran. Namun pada praktiknya UPTD ini belum berjalan secara optimal karena terkendala Sumberdaya baik kuantitas maupun kualitas.

Revitalisasi pasar di Kabupaten Kediri pun masih terdapat beberapa permasalahan. Revitalisasi pasar sebagai wujud dari layanan publik Pemerintah Kabupaten terhadap

sektor perdagangan masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Meskipun di tahun 2021 sudah ada 4 (empat) pasar yang telah direvitalisasi yaitu pasar Kras, Pasar Bendo, Pasar Tiron dan Pasar Gringging namun saat ini masih belum bisa dioperasikan. Bahkan hingga saat ini aktivitas perdagangan masih berada di tempat penampungan sementara. Setidaknya terdapat 390 pedagang yang masih melakukan aktivitas perdagangan di tempat penampungan sementara. Kondisi ini dipengaruhi oleh fasilitas penunjang pasar yang belum siap dan dapat diperasionalkan. Selain itu, kendala banjir juga masih sesekali mengganggu jalannya aktifitas perdagangan di Pasar Gringging.

Adanya pandemi covid-19 di Tahun 2020 yang berimbas pada sektor perekonomian secara luas. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan rata-rata perusahaan mengalami penurunan omset sebesar 40-50 % bahkan ada yang berhenti sementara. Adapun upaya untuk mengawasi jalannya anggaran yang berbasis kinerja, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri melakukannya dengan berdiskusi serta menyampaikan laporan hasil kegiatan beserta anggarannya.

Berdasarkan hasil penelitian Cahyono & Indartuti (2023), pejabat pemerintah desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Mereka menganalisis pelaksanaan ini dengan prinsip-prinsip good governance seperti Akuntabilitas dan Transparansi. Dalam kesimpulan kami, pemerintah desa Mancon telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip

ini. Mereka telah menunjukkan tanggung jawab dan transparansi dalam melaporkan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Silokdes.

Aparatur pelayanan publik di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah menjadi kewajiban untuk mempersiapkan diri dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang lebih optimal lagi, sebab kualitas dan tingkat kemajuan suatu daerah sangat berpengaruh besar terhadap kualitas layanan (Robial, 2023). Terlebih dalam menghadapi tantangan global saat ini dan perkembangan teknologi yang pesat. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan kepercayaan publik akan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan cara menyajikan gambaran menyeluruh, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti (Creswell, 2002). Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan maupun data yang ada dengan lebih mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui

penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan kualitas pelayanan public di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Banjaran Nomor 16 Kota Kediri. Alasan ditentukannya lokasi penelitian tersebut dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri baik secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, beban kerja yang belum merata antar bidang dan kondisi pelayanan pasar belum optimal mengakibatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri belum terlaksana dengan baik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dan beberapa pasar sebagai sumber data pembanding. Peneliti juga memilih UPTD Metrologi Legal sebagai institusi resmi yang membantu langsung Dinas Perdagangan di Kabupaten Kediri. Sementara itu, untuk menentukan informan kunci (*key informan*) pada penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Hal itu dikarenakan sample penelitian didapatkan setelah peneliti melakukan pendalaman permasalahan dari yang awalnya di Dinas Perdagangan sampai akhirnya berkembang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar (Sugiyono, 2017). Beberapa data juga harus didapatkan melalui stakeholder lain seperti pedagang pasar, sehingga metode snowball sampling paling cocok diterapkan pada penelitian ini.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini,

metode pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman (2002). Model ini terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk menyajikan data menjadi lebih sistematis, akurat, dan faktual.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Secara umum unsur-unsur utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan Good Governance (Dwiyanto, 2021) adalah akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, partisipasi dan efisiensi. Ada juga yang menambahkan dengan dua unsur lain yaitu kompetensi manajemen dan hak asasi manusia. Namun yang mendasari definisi Good Governance adalah clean government artinya pemerintah harus bersih dari tindakan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Tapi adanya pemberantasan KKN, konsep good governance tidak mungkin dapat diwujudkan dalam hubungan ini.

Good governance mengedepankan perlunya akuntabilitas publik dan transparansi, bersih dan bertanggungjawab dengan birokrasi yang profesional dan berkembangnya ekonomi pasar yang sehat dan adil dan kompetitif (Cahyono & Indartuti, 2023). Oleh karena itu penerapan prinsip good governance telah menjadi ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik, maka penyelenggaraan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi

agar dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara baik.

Sektor publik sebagai salah satu unsur good governance terkait erat dengan tugas pokok dari fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislative dan yudikatif dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan good governance. Pembentukan disektor publik akan sangat berpengaruh pada keberhasilan terselenggaranya good governance pada sektor swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan kebilangan publik diperlukan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pemanfaatan peluang dan keagairahan kegiatan produktif masyarakat (Winarno, 2008). Artinya peran pemerintan melalui kebijakan publik sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar dan mencegah timbulnya monopoli komersial dan kolusi, korupsi serta nepotisme.

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai "sadar" akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka atau bisas disebut memiliki kesadaran kritis (Prissando & Ambulanto, 2021). Partisipasi masyarakat dalam penerapan good governance bukan hanya dilihat sebagai proses tetapi juga merupakan hasil akhir, yang mana partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pelayanan publik di bidang perdagangan ini (Prissando et al., 2022).

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian dilapangan prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata

pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu bidang dengan bidang lain. Namun paling tidak, ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan good governance salah satunya adalah prinsip partisipasi. Partisipasi tidak hanya sebatas sebagai keterlibatan warga dalam pemilihan umum saja, tetapi juga dalam berbagi aktivitas yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak seperti pada bidang perdagangan dan industri ini. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses dan implementasi kebijakan publik pada bidang akan berujung pada terwujudnya good governance. Selain itu, aktor lain diluar masyarakat menjadi bentuk lain dari kolaborasi antar aktor yang terjalin antar Dinas Perdagangan dengan aktor lainnya (Siti Maryam, 2017)

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam good governance, adalah aktivitas suatu pelayanan yang dilakukan suatu organisasi sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Alfarizi et al., 2023). Akuntabilitas erat tentu erat kaitannya antara penggunaan sumber dana anggaran dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Disamping itu, akuntabilitas erat juga dengan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.

Sesuai dengan visi dan misi Bupati Kediri, Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada bidang industri dan perdagangan. Dinas Perdagangan melaksanakan urusan pilihan dan memiliki tujuan pembangunan yaitu Mengembangkan

keaktivitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan Industri Kecil Menengah (IKM). Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri memiliki 2 sasaran yaitu, 1) Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan 2) Meningkatnya pertumbuhan industri Kecil Menengah. Untuk mengetahui indikator kinerja dari sasaran tersebut dan bagaimana realisasi kinerjanya di tahun 2020 akan disajikan pada tabel berikut ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan ekspor	8,25%	24,33 %
Meningkatnya pertumbuhan industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2,3%	0,18%

Sumber: LKPJ Dinas Perdagangan, 2020

Cukup rendahnya persentase pertumbuhan IKM pada Tahun 2020 dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya pandemi covid-19 di Tahun 2020 yang berimbas pada sektor perekonomian secara luas.
2. Dari evaluasi di lapangan rata-rata perusahaan mengalami penurunan omset sebesar 40–50 % bahkan ada yang berhenti sementara.

Dari observasi peneliti terhadap kinerja program dan anggaran di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk mengawasi jalannya anggaran yang berbasis kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri melakukannya dengan berdiskusi serta menyampaikan laporan hasil kegiatan beserta anggarannya. Diskusi tersebut dituangkan dalam bentuk rapat evaluasi serapan anggaran rutin

tiap bulan oleh Kepala Dinas. Sementara dari hasil evaluasi kinerja sebagai bentuk dari pertanggungjawaban anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri perlu memperbaiki sektor industri. Solusi yang bisa ditawarkan yaitu Menyesuaikan perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu perencanaan kegiatan Pelatihan difokuskan kepada calon wirausaha baru guna menanggulangi kemiskinan. Diadakan studi banding ke luar daerah untuk menambah wawasan dan ketrampilan, khususnya pada pelaku usaha yang sudah berhasil, Diupayakan untuk memaksimalkan kegiatan monev IKM.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik (Tyasotyaningarum, 2019). Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibilitas juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas responsibilitas pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, yang pertama peneliti menanyakan terkait tingkat kecepatan Dinas dalam menangani keluhan masyarakat. Secara umum terkait dengan penanganan keluhan masyarakat ini telah terbantu dengan adanya aplikasi Masbup. Halo Masbup adalah sistem

laporan masyarakat yang dibuat untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Kediri untuk berkomunikasi dengan pemerintah.

Responsibilitas juga akan membicarakan mengenai pertanggung jawaban anggaran (Hanum, 2018). Dari hasil penelitian, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selalu membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tiap akhir tahun. Adapun Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Efisiensi

Efisiensi dalam prinsip good governance adalah kesesuaian antara anggaran dan waktu yang telah ditetapkan (Putra, 2019). Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Ia Ode Syaiful Islamy, 2018). Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Jadi, Unsur utama dalam good governance adalah birokrasi yang efisien. Dengan adanya birokrasi yang efisien maka tugas dalam melayani publik akan lebih

cepat dan rapi, karena apabila kita berkaca pada birokrasi saat ini banyak masyarakat merasa susah dan tidak efisien (Rohman & Trihardianto, 2019). Oleh karena itu cara agar membuat birokrasi yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku dan etika.

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini artinya pelayanan tersebut menuju pada pelayanan yang efisien. Dari sisi lain, dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya efisien dalam menjalankan kelembagaan maupun pelayanan. Prinsip efisiensi dalam penerapan nilai-nilai good governance adalah memiliki tujuan agar output dan outcome program sudah sesuai dengan efisiensi anggaran. Namun pada penerapannya sedikit banyak selalu terdapat perbedaan. Meskipun demikian Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selalu mengupayakan agar sesuai dan efisien.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good governance bisa dikatakan salah satu aspek yang membantu berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance pada bidang industri dan perdagangan. Hal ini dikarenakan faktor pendukung adalah salah satu hal yang mendorong keberhasilan program-program yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pertama adalah dukungan dari pimpinan. Pimpinan dalam konteks ini terdiri dari beberapa tingkat, baik dari level pimpinan OPD sampai dengan pimpinan daerah. Gaya kepemimpinan yang melekat pada Kepala Dinas Perdagangan yaitu egaliter. Pimpinan lebih mengedepankan sikap kekeluargaan dalam menghadapi masalah atau saat menjalankan program kegiatan. Gaya kepemimpinan semacam ini mampu berdampak kepada motivasi dan profesionalitas pegawai untuk memberikan hasil terbaik di setiap pekerjaannya. Adapun di beberapa organisasi tak jarang dijumpai pemimpin yang menganggap dirinya diatas pegawainya, namun yang dilakukan oleh pimpinan Dinas Perdagangan sebaliknya. Kepala Dinas menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi dan posisinya sederajat dengan bawahannya. Hal inilah yang membuat semua bidang yang terlibat mampu berkerjasama dan berkontribusi dalam segala hal tanpa ada pemisah yang membedakan pimpinan dan bawahan. Selain egaliter, Kepala Dinas Perdagangan dikenal sebagai pimpinan yang demokratis. Pemimpin menempatkan diri sebagai koordinator dan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinya untuk mencapai tujuan organisasi. Namun segala bentuk keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama yang harus dijalankan.

Faktor pendukung selanjutnya adanya kolaborasi antara Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan pemerintah provinsi yaitu Kementerian Hukum dan Ham serta pihak ke-tiga. Dengan adanya kolaborasi antara Dinas Perdagangan dengan Kemenkumham Provinsi Jawa

Timur akan lebih mudah dalam kepengurusan hak merk bagi calon industri baru. Hal ini dikarenakan Kemenkumham akan memfasilitasi dan mengawal kepengurusan hak merk tersebut sampai pemerintah pusat. Sebelum adanya kerjasama dengan Kemenkumham Provinsi Jatim kepengurusan hak merk banyak yang gagal atau memakan proses lama, sedangkan dengan adanya kolaborasi ini mempercepat pendaftaran merk kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

Selain fasilitasi, faktor yang juga menjadi pendukung dalam pelayanan publik berlandaskan good governance adalah adanya pengawasan langsung dari aparat penegak hukum saat membangun pasar. Adapun pendampingan penegak hukum yang terlibat langsung ketika membangun pasar yaitu Polres dan Kejaksaan. Selain membantu mengawasi jalannya pembangunan sehingga menciptakan rasa aman bagi para pedagang pasar, Pendampingan ini juga berdampak pada peningkatan sisi akuntabilitas pembangunan pasar. Dasar dari pengawasan dan pendampingan ini juga tertuang dalam MOU antara Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan lembaga penegak hukum tersebut.

Dengan adanya MOU yang sudah terjalin, kedepannya bukan hanya saat membangun pasar melainkan juga ketika mengawasi pedagang pasar yang ingin mencoba melakukan tindak kecurangan. Pasar sebagai alat transaksi paling mudah di jumpai di seluruh Indonesia tentu memiliki karkater pedagang yang bermacam-macam. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Kediri cenderung lebih memilih pasar untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Dengan begitu pengawasan langsung dari aparat penegak hukum ini memastikan wilayah pasar menjual bahan

makanan yang sehat dan higienis untuk menjadi prioritas utam. Sehingga masyarakat di Kabupaten Kediri dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya, penerapan pelayanan publik berbasis good governance di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri juga perlu memperhatikan faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri memiliki beberapa kendala dan hambatan yang muncul dan berpotensi melemahkan prinsip-prinsip good governance pada saat memberi layanan. Hambatan tersebut muncul dari internal organisasi maupun diluar organisasi.

Hambatan yang pertama adalah Kepala Dinas Perdagangan yang belum definitive. Seperti yang telah disajikan sebelumnya bahwa satu sisi gaya kepemimpinan kepala dinas cukup supportif dan egaliter sehingga program kerja organisasi dapat berjalan optimal, namun di sisilain keberadaan kepala dinas yang belum definitive ini juga berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. Kepala Dinas Perdagangan saat ini merangkap jabatan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Kabupaten Kediri (DKPP) dan justru secara definitve menjadi kepala dinas di DKPP. Rangkap jabatan ini menyebabkan responsibilitas dalam mengambil keputusan sedikit terganggu.

Selain itu, tugas dan fungsi Pelaksana Tugas atau (Plt) dibatasi oleh aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek

Kepegawaian pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Faktor penghambat kedua yaitu terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Sebagai gambaran bagaimana kondisi SDM yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri saat ini, hanya memiliki 1 (satu) staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan kepada 2 (dua) bidang sekaligus yaitu industri dan perdagangan. Sedangkan mayoritas staf adalah berstatus tenaga kontrak. Tentunya hal ini berdampak pada tidak bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pegawai kontrak tersebut karena secara langsung tidak bisa ditunjuk secara langsung sebagai PPTK. Pegawai kontrak sesuai dengan tugas dan fungsinya hanyalah sebagai tenaga yang diperbantukan untuk menunjang pekerjaan dinas, sedangkan pada level PNS dibutuhkan kinerja yang lebih dan tuntutan profesionalitas. Hal ini ditambah dengan kebutuhan Kepala Seksi (Kasi) sejumlah (tiga) masih terdapat 1 (satu) kasi yang kosong sehingga yang terisi hanya 2 (dua) Kasi. Dari 2 (dua) kasi tersebut, 1 (satu) kasi lainnya merangkap jabatan di UPT Metrologi

sehingga kebutuhan akan pegawai di Dinas Perdagangan sangatlah diperlukan.

Selain kuantitas, kualitas staf juga dirasa perlu ditingkatkan. Bidang perdagangan yang memang harus memiliki jiwa entrepreneurship saat ini masih terkendala pada mindset lapangan. Sehingga, SDM baik dibidang industri maupun perdagangan harus beradaptasi dengan tupoksi kerjanya agar lebih memperoleh hasil pelayanan yang lebih optimal.

Faktor penghambat ketiga berasal dari eksternal atau luar organisas yaitu intervensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahun 2020 Kabupaten Kediri membangun 4 (empat) pasar yaitu Pasar Bendo, Pasar Tiron, Pasar Gringging dan Pasar Kras semuanya itu mendapat intervensi dari LSM. Aksi "premanisme" yang dilakukan oleh LSM ini terjadi berulang kali. LSM sering bertindak diluar jalur hukum dalam memberikan tuntutannya. Hal ini sangat merugikan fokus kinerja yang sedang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Bahkan tidak jarang pegawai kontrak di Dinas Perdagangan yang harus berbicara dengan LSM tersebut. Secara wewenang, pegawai kontrak tidak memiliki kewajiban untuk menjabatani keinginan LSM dengan Pemerintah, namun dikarenakan kurang staf PNS dan Kasi, hal tersebut terpaksa dilakukan. Hal tersebut diperparah dengan tidak hadirnya Plt Kepala Dinas saat proses negosiasi, sehingga berakibat pada terdistraksinya pekerjaan rutin yang dilakukan dikarenakan harus melayani tuntutan dari LSM tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas

Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun memiliki beberapa catatan. Pada focus rumusan masalah yang pertama yaitu transparansi dapat dikatakan sudah transparan namun perlu diperkuat komitmen antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sementara untuk focus kedua yaitu partisipasi dapat dikatakan belum terlalu partisipatif, karena belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh Ketika Menyusun kebijakan. Fokus yang ketiga yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas di Dinas Perdagangan sudah kuat dan berperan dalam meningkatkan kapasitas Lembaga dan yang terakhir adalah responsifitas dimana Dinas Perdagangan cukup responsive karena banyak keluhan dari masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti namun apabila ada keluhan yang tidak mampu diselesaikan maka Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah tingkat di atasnya untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara itu, untuk melihat bagaimana faktor pendorong dan penghambat menghasilkan beberapa poin. Pertama, Faktor pendukung terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu peran dan dukungan pimpinan, kolaborasi antar pemerintah, dan pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Sementara Kedua Faktor penghambat terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu kepala dinas yang belum definitif, keterbatasan SDM, dan adanya laporan dari LSM.

PENGHARGAAN

Penghargaan ditujukan kepada Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam webinar nasional. Selain itu kepada Kepala

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dan staff yang sudah berkenan memberikan izin dan data dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Alfarizi, M. R. I., Risprawati, R., Basariah, B., & Alqadri, B. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18868–18878.
- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(01), 56–61.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. KIK.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Hanum, F. (2018). Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- la Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Prissando, F. A., & Ambulanto, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kediri Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. *Jurnal Mediasosian*:

Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 5(1).

Prissando, F. A., Fachruddin, I., Susanto, D., & Mashuri, M. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Program SAKTI di Kelurahan Bujel Kota Kediri. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 115–123.

Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293–4302.

Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Intrans Publishing.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Alfabeta .

Tarandung, S. N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(127), 54–62.

Tyasotyningarum, B. (2019). Praktik Open Government Melalui Partisipasi Publik di Kabupaten

Bojonegoro dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1).

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita.